

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara memiliki tiga sumber pendapatan untuk menunjang kegiatannya yang berasal dari sektor penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 1,76 kuadriliun dengan rincian anggaran sebagai berikut, penerimaan pajak sebesar 1,46 kuadriliun, penerimaan bukan pajak sebesar 0.3 kuadriliun dan hibah sebesar 0,5 triliun. Dapat dilihat dari statistik penerimaan pajak mempunyai persentase sebesar 83 persen dari total keseluruhan penerimaan semua sektor dan menjadikannya sebagai penerimaan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.

Penerimaan pajak merupakan penerimaan negara berupa iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2016:1). Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang menikmati atau menggunakan fasilitas umum sehingga warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu diharuskan untuk membayar pajak.

Dilihat dari data penerimaan pajak, terdapat peran besar masyarakat untuk membayar pajak dalam menanggung pembiayaan negara, adapun peran pajak bagi negara dan bagi perusahaan. Salah satu peran pajak bagi negara yaitu fungsi anggaran (*budgeter*) dimana fungsi anggaran merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari Wajib Pajak ke kas negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran lainnya (Siti Resmi 2017:3). Sedangkan peran pajak bagi perusahaan salah satunya adalah sebagai tolak ukur sehatnya keuangan perusahaan dalam arti keuangan perusahaan terhindar dari keterlambatan membiayai pajak sehingga terhindar dari sanksi/denda. Untuk itu, diperlukan adanya pengujian kewajaran atas penyajian akun pajak sehingga dapat mengoptimalkan pengendalian akun pajak seperti pajak dibayar di muka.

Pajak dibayar di muka merupakan pajak yang telah dibayarkan atas suatu penghasilan kena pajak. Pajak dibayar di muka timbul akibat adanya penerapan salah satu sistem pemungutan pajak yaitu sistem *withholding tax*. Dalam sistem *withholding tax*, pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas negara melalui pihak yang memberikan penghasilan atau pihak ketiga.

Di akhir tahun pajak, pajak yang telah dipotong atau dipungut dan telah disetorkan ke kas negara melalui pihak ketiga bisa diakui menjadi pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan. Untuk itu, perusahaan diharuskan untuk melakukan rekonsiliasi untuk menyesuaikan pencatatan menurut periode akuntansi dengan tahun pajak. Hal ini bertujuan agar memastikan adanya kesesuaian antara nilai pajak yang telah disetorkan melalui pihak ketiga yaitu nilai yang terdapat di bukti potong atau Surat Setoran Elektronik (SSE) agar terbentuknya pemenuhan hak Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa berupa jasa *freight forwarding*, dimana dalam kegiatan operasionalnya selalu berkaitan dengan pajak dibayar di muka mengingat PT ABC adalah sebagai *forwarder* yang menerima penghasilan atas jasa *forwarding* yang digunakan oleh pihak lain. Nantinya, pihak yang memberikan penghasilan kepada PT ABC tersebut akan menerbitkan bukti potong sebagai tanda bahwa penghasilan PT ABC sudah dipotong pajak penghasilan dan akan disetorkan kepada negara. Pajak yang sudah dipotong dan diterbitkan bukti potongnya tersebut akan menjadi sebuah transaksi pajak dibayar di muka sehingga dapat dikreditkan pada perhitungan pajak badan terutang.

Timbulnya pajak dibayar di muka pada PT ABC terjadi pada saat menerima penghasilan atas jasa *freight forwarding* dan angsuran pajak terutang badan pada tahun 2018. Pajak tersebut disajikan pada akun pajak dibayar di muka yang berada pada aset lancar karna dalam pelaporannya akun tersebut akan dikreditkan sebagai penguang pajak terutang pada periode pajak yang sama dengan catatan terdapat bukti pemotongan yang diberikan pihak lain kepada PT ABC, sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam perpajakannya berada pada kondisi kurang bayar atau lebih bayar.

Peran auditor diperlukan untuk memperhitungkan besaran pajak yang terutang, oleh karena itu auditor harus memastikan bahwa semua pajak penghasilan dibayar di muka telah didukung bukti yang memenuhi persyaratan sehingga dapat dijadikan kredit pajak penghasilan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan perusahaan sangat mungkin menutupi status lebih bayar mereka pada perhitungan pajak terutang dikarenakan tidak ingin dilakukan pemeriksaan yang bisa menimbulkan kebalikannya yaitu kurang bayar yang lebih besar dibanding kurang bayar yang telah mereka perhitungkan. Untuk itu auditor dapat memberikan saran dan masukan kepada Wajib Pajak dan memberikan koreksi apabila ada kesalahan dalam perhitungan perpajakan perusahaan. Auditor akan melakukan prosedur dimulai dari menguji akun pajak dibayar di muka yang terdapat di PT ABC dengan meminta daftar pajak dibayar di muka. Selanjutnya adalah merekap bukti pajak penghasilan dibayar di muka untuk dianalisis lebih lanjut hingga dapat disimpulkan bahwa hak pengkreditan pajak dapat digunakan. Auditor juga akan memeriksa perhitungan pajak penghasilan tahun berjalan dengan mengacu pada PSAK 46 untuk memastikan rekonsiliasi yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan dengan peraturan dan melakukan *review* perhitungan pajak final periode tahun sebelumnya untuk memastikan ada atau tidaknya hak ataupun kewajiban pajak yang mungkin timbul. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai “**Audit atas Pajak Penghasilan Dibayar di Muka pada PT ABC**”.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya, berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tahap penerimaan perikatan audit antara KAP TFSNR&R dengan PT ABC?
2. Bagaimana tahap perencanaan audit KAP TFSNR&R pada PT ABC?
3. Bagaimana tahap pelaksanaan audit atas pajak penghasilan dibayar di muka pada PT ABC?

4. Bagaimana tahap penyelesaian dan pelaporan audit KAP TFSNR&R pada PT ABC?

1.3 Tujuan

Sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya, maka tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan tahap penerimaan perikatan audit antara KAP TFSNR&R dengan PT ABC
2. Menguraikan tahap perencanaan audit KAP TFSNR&R pada PT ABC
3. Menguraikan tahap pelaksanaan audit atas pajak penghasilan dibayar di muka pada PT ABC
4. Menguraikan tahap penyelesaian dan pelaporan audit KAP TFSNR&R pada PT ABC

1.4 Manfaat

Tugas akhir ini bagi penulis diharapkan dapat menjadi referensi terhadap pembaca agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam ruang lingkup audit atas perpajakan. Adapun manfaat khusus yang penulis harapkan yaitu :

Bagi perusahaan

Adanya tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan manajemen dalam mengambil keputusan terkait pengendalian akun pajak dibayar di muka sehingga dapat menyajikan informasi akun tersebut di laporan keuangan secara sewajarnya. Perusahaan juga diharapkan menjadi lebih paham tentang pajak yaitu mengenai tata cara perhitungan pajak, mengetahui kesalahan-kesalahan yang terjadi yang mengakibatkan hilangnya hak pengkreditan pajak dibayar di muka dan perusahaan akan lebih mengoptimalkan pajak dibayar di muka yang ada.

Bagi KAP

Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atas proses audit yang dilakukan sehingga bisa meningkatkan kinerja.

Bagi akademis

Tugas akhir ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi ilmiah sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam menganalisis perhitungan pajak perusahaan.

Bagi Penulis

Penulis dapat mengetahui tata cara perhitungan pajak dalam praktek yang sesungguhnya, mengetahui beberapa faktor yang dapat menimbulkan dan menghapuskan pajak dibayar di muka pada PT ABC serta penulis mendapatkan wawasan yang luas tentang pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.